



P U T U S A N
NOMOR : 15/PID.SUS/2013/PT. GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **MOHAMMAD FAISAL MOODOETO, S.Sos, MH.**
Tempat Lahir : GORONTALO ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 16 September 1969 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Piola Isa No. 169 Kel. Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan: -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: -----
ISMAIL PELU, SH., dan Rekan Advokat-Pemberi Bantuan Hukum, beralamat di Jl. Kancil Nomor 163 Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : W20-U1/50/AT.03.06/XI/2012 tanggal 27 November 2012; -----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :

15/Pid.Sus...

Halaman1 dari 62, Putusan No:15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pid.Sus/2013/PT.Gltotanggal 10 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :02/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Gtlo, tanggal 26 September 2013 atas nama Terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara: PDS-05/GORON/1212,tanggal15 Januari2013,Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD FAISAL MOODOETO, MH** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkanKeputusan Walikota Gorontalo Nomor 821.2/BKD-DIKLAT/2534/2005 tanggal 15 November 2005 tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris DPRD Kota Gorontalo, bersama dengan HASNIAH TOMAYAHU, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, di Kantor Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo, **yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 kantor Sekertariat DPRD Kota Gorontalo terdapat anggaran Pos Sekretariat DPRD Kota Gorontalo...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo kode rekening 1.20.04.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,- dipergunakan untuk
 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 6.050.000.000,-sar ;-----
 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 195.500.000,-;-----
 3. Sosialisasi peraturan per UU an Rp. 172.000.000,-;-----
 4. Pembahasan peraturan per UU an Rp. 300.000.000,-;-----
 5. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rp. 800.000.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo bersama HASNIAH TOMAYAHU, SE bertugas mengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Gorontalo telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah.-----
- Bahwa dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban terdakwa membuat semua pertanggungjawaban penggunaan dana berupa :
 - a. Kwitansi Tanda Penerimaan uang dari yang melaksanakan perjalanan dinas ;-----
 - b. Laporan Hasil Perjalanan Dinas ;-----
 - c. Tiket dan Boarding Pass ;-----
 - d. SPT (Surat Perintah Tugas) ;-----
 - e. SPPD(Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah di Cap dan ditanda tangani didaerah tempat tujuan ;-----
 - f. Rincian perjalanan Dinas ;-----
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah, mekanisme yang harus dilakukan adalah :-----
 - Adanya proposal/surat dari Kementerian;-----
 - Proposal/surat dari Kementerian, di disposisi Ketua Dewan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT);-----

- SPT...

Halaman 3 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT dibuat oleh Sekretaris Dewan (terdakwa) dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan;-----
- Bagian Keuangan atas dasar SPT membuat SPPD/SPP/SPM yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Sekretaris Dewan dan Bendahara Pengeluaran ;-----
- SPP/SPM/SPPD oleh bendahara dikirim ke DPPKAD Kota Gorontalo untuk diterbitkan SP2D;-----
- SP2D diterima oleh bendahara Pengeluaran untuk diserahkan kepada pelaksana SPPD.-----
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo tersebut, oleh terdakwa dan HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran dan kemudian digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo, pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo dan isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, dengan perincian :-----
 - Perjalanan dinas luar daerah 27 orang pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo ;-----
 - Perjalanan dinas luar daerah 26 orang pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo ;-----
 - Perjalanan dinas luar daerah 4 isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, untuk konsultasi ke Depdagri dan kementerian lainnya ;-----
- Bahwa terdakwa MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH bersama HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, tetapi semua SPPD hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang dibuat oleh terdakwa tanpa dilakukan pengecekan kebenaran SPT.-----
- Bahwa...

Halaman 4 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH bersama HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang seolah-olah telah dilaksanakan, padahal perjalanan luar daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada di Surat Perintah Tugas dalam SPPD luar daerah tersebut.-----

- Bahwa terdakwa MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH sebagai Sekretaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran dan selama Januari sampai dengan Oktober 2008 telah menggunakan dana sebesar Rp. 7.517.500.000,- dengan cara membuat SPPD Luar Daerah sebanyak 726 perjalanan dinas luar daerah dimana 527 diantaranya tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, dengan rincian sebagai berikut:

1) Perjalanan dinas luar daerah oleh pimpinan dan anggota DPRD Perjalanan dinas oleh 27 pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, dengan perincian yaitu:-----

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADHAN DAMBEA ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp167.080.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, lima perjalanan dinas senilai Rp64.280.000,00 ditemukan nama ADHAN DAMBEA dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak delapan kali (13-5) senilai Rp102.800.000,00 (Rp167.080.000,00 – Rp64.280.000,00).-----

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FIKRAN AZ SAILAMA ;-----

Untuk...

Halaman 5 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 40 kali senilai Rp517.060.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp154.320.000,00 ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 30 kali (40-10) senilai Rp362.740.000,00 (Rp517.060.000,00-Rp154.320.000,00) tidak ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh
FERIYANTO MAYULU ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp123.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, dua perjalanan dinas senilai Rp19.500.000,00 ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak sepuluh kali (12-2) senilai Rp103.950.000,00 tidak ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL
LATIF YUNUS ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ALY sebanyak 24 kali senilai Rp265.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam keberangkatan atas nama ALY dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 17 kali (24-6) tidak ditemukan nama ALY dalam manifest penerbangan dan satu keberangkatan ke Kotamubagu via perjalanan darat tidak ada bukti keberangkatannya senilai Rp168.440.000,00 (Rp265.340.000,00 - Rp96.900.000,00).-----

5. Pelaksanaan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RAMLI DJAFAR ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp333.980.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp118.770.000,00 ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan, satu perjalanan dinas ke Manado via perjalanan darat senilai Rp10.600.000,00 dan sisa perjalanan dinas sebanyak 18 kali (29-10) senilai Rp204.610.000,00 (Rp333.980.000,00 - Rp118.770.000,00 - Rp10.600.000,00) tidak ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan tersebut.-----
6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SAHLAN TAPULU ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 16 kali senilai Rp171.400.000,00.. ST tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 16 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp61.600.000,00,- sehingga yang tidak ada bukti sebesar Rp109.800.000,00 (Rp171.400.000,00 - Rp61.600.000,00) ;-----
7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RIDWAN PODUNGGE ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada RP sebanyak 19 kali senilai Rp200.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama RP dalam sembilan keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp95.300.000,00 dan satu kali keberangkatan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan via darat ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak sembilan keberangkatan perjalanan dinas (19-10) tidak ditemukan nama RP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp94.550.000,00 (Rp200.450.000,00 - Rp95.300.000,00 - Rp10.600.000,00) ;-----

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIMIN

8. DUGGIO ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp316.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas atas nama ADUNG dalam manifest penerbangan, 21 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ADUNG dalam manifest penerbangan tersebut dan satu perjalanan dinas ke Kotamubagu via perjalanan darat sebesar Rp226.650.000,00 (Rp316.000.000,00 - Rp89.350.000,00); -----

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HAMAN

9. TABAS ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 27 kali senilai Rp294.400.000,00. HTA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 27 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya tujuh kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp76.350.000,00 sebesar Rp218.050.000,00 (Rp294.400.000,00 - Rp76.350.000,00).-----

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJONI DAMA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bersangkutan sebanyak 26 kali senilai Rp282.000.000,00. JD tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 26 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp58.250.000,00 sebesar Rp223.750.000,00 (Rp282.000.000,00 - Rp58.250.000,00) ;-----

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh KISMAN PULUHULAWA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp318.500.000,00. KP tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 30 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya sembilan kali dan menerima pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp92.950.000,00. Dari sembilan perjalanan tersebut, satu perjalanan dinas ke Mamuju KP tidak berangkat namun menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp8.800.000,00 sebesar Rp 234.350.000,00 (Rp 318.500.000,00 – Rp 92.950.000,00 + Rp 8.800.000,00) -----

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELMI ADAM;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp69.000.000,00. HA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak tujuh kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak empat kali senilai Rp31.500.000,00 sebesar Rp37.500.000,00 (Rp 69.000.000,00 – Rp 31.500.000,00);-----

13. Pelaksanaan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YANTI

SIBA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 23 kali senilai Rp254.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama YS dalam tujuh keberangkatan. Selain itu terdapat satu kali keberangkatan ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak 15 keberangkatan perjalanan dinas tidak ditemukan nama YS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp 166.050.000,00 (Rp 254.250.000,00 – Rp 88.200.000,00) ;-----

14 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN MUSTAFA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp44.550.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak ditemukan nama ZM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp44.550.000,00.-----

15 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh USMAN POLAPA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp46.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26 Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkan pengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkan dengan adanya undangan partai di Pekanbaru. Selain itu untuk

tiga...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga perjalanan dinas lainnya tidak ditemukan nama UP dalam manifest penerbangan sebesar Rp46.400.000,00

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FARID USMAN ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp308.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo mengakibatkan tujuh perjalanan dinas senilai Rp84.950.000,00 terdapat nama FU dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Kotamobagu via darat senilai Rp7.000.000,00. Sisanya sebanyak 21 perjalanan (29-8) senilai Rp216.950.000,00 tidak tercantum nama FU dalam manifest penerbangan sebesar Rp216.950.000,00 (Rp308.900.000,00 - Rp84.950.000,00 - Rp7.000.000,00);-----
17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUPARDI PUJO ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 33 kali senilai Rp348.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, enam perjalanan dinas senilai Rp64.900.000,00 ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 perjalanan dinas luar daerah (33-6) tidak ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp284.000.000,00 (Rp 348.900.000,00 – Rp 64.900.000,00) ;-----
18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh INDRAWANTO HASAN ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp257.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai...



maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat hanya dua kali keberangkatan atas nama IH senilai Rp23.200.000,00 yang ditemukan dalam manifest penerbangan. Sedangkan 22 perjalanan dinas sisanya (24-2) tidak ditemukan nama IH dalam manifest penerbangan sebesar Rp233.800.000,00 (Rp257.000.000,00 - Rp23.200.000,00);-----

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh

19. DJAHRA MAUDA;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 31 kali senilai Rp330.550.000,00. Selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp57.100.000,00 ;-----

yang tercantum nama DM dalam manifest penerbangan. Sisanya sebanyak 26 perjalanan dinas (31-5) tidak ditemukan nama DM dalam manifest penerbangan sebesar Rp273.450.000,00 (Rp330.550.000,00 – Rp57.100.000,00);-----

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ERWIN RAUF;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp316.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas senilai Rp92.600.000,00 dengan nama ER tercantum dalam manifest penerbangan. Sedangkan 21 perjalanan dinas sisanya (29-8), tidak ditemukan nama ER dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp223.800.000,00 (Rp316.400.000,00 – Rp92.600.000,00);-----

21. Pelaksanaan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IBHRAHIM MOES HIIPITO;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada IMH sebanyak 19 kali senilai Rp203.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat perjalanan dinas ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya 14 perjalanan dinas (19-5) tidak ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan sebesar Rp150.250.000,00 (Rp203.250.000,00 – Rp53.000.000,00).-----
22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IKE DJAFAR KASIM;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 11 kali senilai Rp115.850.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya enam perjalanan dinas (11-5) tidak ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan sebesar Rp62.800.000,00 (Rp115.850.000,00 – Rp53.050.000,00) ;-----
23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NELLY MARJUN;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp321.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama NEM dalam manifest penerbangan, sisanya sebanyak 24 perjalanan...

Halaman 13 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas (30-6) tidak ditemukan nama NEM dalam manifest penerbangan sebesar Rp262.000.000,00 (Rp321.900.000,00 – Rp59.900.000,00);-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RUSNI DJAFAR;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp265.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama RUDJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya 18 perjalanan dinas (24-6) tidak ditemukan nama RUDJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp202.800.000,00 (Rp265.000.000,00 – Rp62.200.000,00) ;-----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASRIYATI NADJAMUDIN;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp73.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan, dan tiga perjalanan dinas tidak ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan tersebut. sebesar Rp33.700.000,00 (Rp73.150.000,00 – Rp39.450.000,00)

26. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN DUNDA;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 20 kali senilai Rp214.270.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari

Gorontalo...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, ditemukan tujuh keberangkatan dengan atas nama ZD dalam manifest penerbangan dan 14 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ZD dalam manifest penerbangan sebesar Rp137.570.000,00 (Rp214.270.000,00 – Rp76.700.000,00)-----

27. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NMO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 14 kali senilai Rp179.560.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp67.940.000,00 atas nama NMO dalam manifest penerbangan. Sedangkan sembilan pelaksanaan perjalanan dinas sisanya (14-5) senilai Rp111.620.000,00 (Rp179.560.000,00 - Rp67.940.000,00) tidak ditemukan nama NMO dalam manifest penerbangan.-----

2) Perjalanan Dinas oleh Pegawai Sekretariat DPRD
Perjalanan dinas oleh 26 pegawai sekretariat DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008 dengan perincian, yaitu:-----

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL KADIR SABA ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua perjalanan dinas senilai Rp10.200.000,00 atas nama AKS dalam manifest penerbangan. Sedangkan tiga perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama AKS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp15.300.000,00 (Rp25.500.000,00 – Rp10.200.000,00);-----

2. Pelaksanaan ...

Halaman 15 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASDIN PAKAYA ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp89.950.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama ASDP dalam manifest penerbangan. Sedangkan sepuluh perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama ASDP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp74.750.000,00 (Rp89.950.000,00 - Rp15.200.000,00) ;-
3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DANDI WINARDI DATAU;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp28.500.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama DWD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp28.500.000,00 ;-----
4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ELLEN YUNUS;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp22.000.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ELY dalam manifest penerbangan sebesar Rp22.000.000,00;-----
5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HENDRIYNTO UMAR;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai
Rp32.600.000,00 ...

Halaman 16 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HU dalam manifest penerbangan sebesar Rp32.600.000,00;-----

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOHAMMAD FAISAL MOODUTO

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp33.100.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan via darat ke Manado dengan nilai total Rp19.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan dinas sisanya tidak tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.000.000,00 (Rp33.100.000,00 - Rp19.100.000,00);--

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOH. NUR MAKU;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp33.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tiga perjalanan dinas atas nama MNMN senilai Rp19.200.000,00. Sedangkan sisanya dua keberangkatan tidak ditemukan nama MNMN dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.140.000,00 (Rp33.340.000,00 – Rp19.200.000,00);-----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YUSRIN DAUD;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak sepuluh kali senilai
Rp 64.800.000,00.

Halaman 17 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 64.800.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama YD dan delapan perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama YD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp51.750.000,00 (Rp64.800.000,00 - Rp13.050.000,00);--

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIEF MURSILA KOLI ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp31.350.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMK dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp31.350.000,00;-----

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUFENTI RAUF;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama SUFR dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp25.500.000,00;-----

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HASNIAH TOMAYAHU;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp26.900.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HT dalam manifest penerbangan sebesar Rp26.900.000,00;-----

12. Pelaksanaan ...

Halaman 18 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDURAHMAN MOINTI;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak delapan kali senilai Rp51.990.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat empat keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp24.800.000,00 tercantum nama AM dalam manifest penerbangan. Atas empat perjalanan dinas sisanya (8-4), tidak terdapat nama AM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp27.190.000,00;-----
13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh EFENDI LAMATENGO;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp96.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut: -----
Terdapat tiga perjalanan dinas senilai Rp24.450.000,00 yang tercantum nama EFL dalam manifest penerbangan sebesar Rp71.700.000,00 (Rp96.150.000,00 – Rp24.450.000,00)-----
14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELDI DIANO DUNGGIO;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada HD sebanyak dua kali senilai Rp10.300.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HD dalam manifest penerbangan sebesar Rp10.300.000,00.-----

15. Pelaksanaan ...

Halaman 19 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh LINANG MUSA ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.200.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama LM dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.200.000,00;-----
16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADAM DUMBI ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ADM sebanyak tiga kali senilai Rp17.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ADM dalam manifest penerbangan sebesar Rp17.400.000,00;-----
17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh TITIN YUSUF;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp12.100.000,- Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas perjalanan dinas ke KPU tidak terdapat nama TY dalam manifest penerbangan sebesar Rp6.500.000,00;-----
18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh AMNAWATI YAHYA;-----
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air
Keberangkatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMNY dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp11.400.000,00 ;-----

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MEISKE USULI ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama MU dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.600.000,00;---

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRWAN DAGONG ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, terdapat dua nama ID dalam manifest penerbangan senilai Rp12.400.000,00. Sisanya sebanyak tiga perjalanan tidak ditemukan nama ID dalam manifest penerbangan sebesar Rp20.200.000,00 (Rp32.600.000,00 – Rp12.400.000,00) ;

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HERMANTO THALIB ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali senilai Rp15.300.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, atas dua perjalanan dinas ke Jakarta, tidak terdapat nama HTL dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.400.000,00 (Rp15.300.000,00 - Rp3.900.000,00) ;

22. Pelaksanaan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRAMAYA ERAKU ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.800.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama IE dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.800.000,00;-----
23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh Z U B A I R ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp44.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat tiga keberangkatan senilai Rp18.100.000,00 sedangkan sisanya empat keberangkatan tidak ditemukan nama Z dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp.26.000.000,00 (Rp.44.100.000,00 – Rp.18.000.000,00);-----
24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RISAN ISMAIL ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp42.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas tujuh perjalanan dinas yang dinyatakan dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran, ditemukan tiga perjalanan dinas senilai Rp19.200.000,00 tercantum nama RIS dalam manifest penerbangan, sedangkan empat pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp23.050.000,00 (Rp42.250.000,00 - Rp19.200.000,00) tidak ditemukan nama RIS dalam manifest ...

Halaman 22 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



manifest penerbangan tersebut; -----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RONAL IDRUS ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp26.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, hanya terdapat dua nama RID dalam manifest penerbangan dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp14.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan sisanya tidak tercantum namaRID dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (Rp26.600.000,00 – Rp14.100.000,00).;-----

- 3) PerjalananDinas oleh Istri Pimpinan DPRD;-----
Empat istri pimpinan DPRD melaksanakan 21 perjalanan dinas luar daerah. Istri pimpinan DPRD dicantumkan dalam lembar SPPD sebagai pengikut dalam SPPD yang bersangkutan senilai sebesar Rp185.050.000,00.;-----

- Bahwa dalam membuat SPPD Luar Daerah tersebut, terdakwa dan HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku bendahara pengeluaran hanya melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh terdakwa tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap SPT.
- Bahwa pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat oleh terdakwa tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tetapi hanya dibuat secara formalitas/rekayasa.-----
- Bahwa dari SPPD Luar daerah yang dibuat oleh terdakwa di catat dalam Buku Kas Umum (BKU) oleh HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku bendahara pengeluaran.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat SPPD tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan :-----

1.Pasal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :-----

(1). PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah di sediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.-----

(2). (a) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.-----

(3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang nerkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Pasal 61 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----

3. Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK SKPD mempunyai tugas melakukan verifikasi SPPD.

5. Pasal 3 Peraturan Walikota Gorontalo No. 9 tahun 2008 ayat (1) Walikota, Wakil Walikota, pimpinan DPRD dan sekretrais daerah karena kedudukan protokolernya diharuskan didampingi oleh suami/isteri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/isteri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas PNS

eselon ...

Halaman 24 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eselon lib tanpa diberikan uang representasi.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Daerah atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.GOR/II/2011 tanggal 14 Oktober 2011, terdapat kerugian negara, yaitu :-----

Jumlah Kas Daerah yang dikeluarkan Rp 7.346.140.000,00 untuk membiayai belanja perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008

Perjalanan dinas riil yang dilaksanakan Rp 2.027.130.000,00 sesuai hasil penyidikan dan manifest sebagai bukti pendukung

Kerugian Daerah	Rp	5.319.010.000,00
------------------------	-----------	-------------------------

Pengembalian ke Kas Daerah	Rp	931.430.000,00
----------------------------	----	----------------

Kerugian Daerah yang harus dipulihkan	Rp	4.387.580.000,00
---------------------------------------	----	------------------

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama HASNIAH TOMAYAHU, SE sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memperkaya terdakwa dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar **Rp. 5.319.010.000,00** (lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ...

Halaman 25 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD FAISAL MOODOETO, MH** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 821.2/BKD-DIKLAT/2534/2005 tanggal 15 November 2005 tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris DPRD Kota Gorontalo, bersama dengan HASNIAH TOMAYAHU, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, di Kantor Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 kantor Sekertariat DPRD Kota Gorontalo terdapat anggaran Pos Sekretariat DPRD Kota Gorontalo kode rekening 1.20.04.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kota Gorontalo/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):-----
Tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris DPRD Kota Gorontalo adalah :-----
 - a) . Memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kota Gorontalo.-----
 - b).Menyiapkan ...

Halaman 26 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyiapkan kegiatan rapat-rapat Anggota DPRD Kota Gorontalo. -----
- c) Menyusun rencana Anggaran untuk kegiatan Oprasional di DPRD Kota Gorontalo.-----
- d) Menyiapkan Anggaran perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Kota Gorontalo.-----
- e) Meminta pertanggung jawaban bagi anggota DPRD Kota Gorontalo yang selesai melakukan perjalanan Dinas;-----
- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo bersama HASNIAH TOMAYAHU, SE bertugas mengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Gorontalo telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah.-----
- Bahwa dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban terdakwa membuat semua pertanggungjawaban penggunaan dana :-----
 - a. Kwitansi Tanda Penerimaan uang dari yang melaksanakan perjalanan dinas ;-----
 - b. Laporan Hasil Perjalanan Dinas ;-----
 - c. Tiket dan Boarding Pass ;-----
 - d. SPT (Surat Perintah Tugas) ;-----
 - e. SPPD(Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah di Cap dan ditanda tangani didaerah tempat tujuan . -----
 - f. Rincian perjalanan Dinas ;-----
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah, mekanisme yang harus dilakukan adalah :-----
 - Adanya proposal/surat dari Kementerian;-----
 - Proposal/surat dari Kementerian, di disposisi Ketua Dewan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT);-----
 - SPT dibuat oleh Sekretaris Dewan (terdakwa) dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan;-----
 - Bagian Keuangan atas dasar SPT membuat SPPD/SPP/
 - SPM....

Halaman 27 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Sekretaris Dewan dan Bendahara Pengeluaran ;-----

- SPP/SPM/SPPD oleh bendahara dikirim ke DPPKAD Kota Gorontalo untuk diterbitkan SP2D;-----
- SP2D diterima oleh bendahara Pengeluaran untuk diserahkan kepada pelaksana SPPD.-----
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo tersebut, oleh terdakwa dan HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran dan kemudian digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo, pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo dan isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, dengan perincian :-----
 - Perjalanan dinas luar daerah 27 orang pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo;-----
 - Perjalanan dinas luar daerah 26 orang pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo;-----
 - Perjalanan dinas luar daerah 4 isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, untuk konsultasi ke Depdagri dan kementerian lainnya , -----
- Bahwa terdakwa MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH bersama HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, tetapi semua SPPD hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang dibuat oleh terdakwa tanpa melakukan pengecekan kebenaran SPT.-----
- Bahwa terdakwa MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH bersama HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas...

Halaman 28 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Luar Daerah yang seolah-olah telah dilaksanakan, padahal perjalanan luar daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada di Surat Perintah Tugas dalam SPPD luar daerah tersebut.-----

- Bahwa terdakwa MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH sebagai Sekretaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran dan selama Januari sampai dengan Oktober 2008 telah menggunakan dana sebesar Rp. 7.517.500.000,- dengan cara membuat SPPD Luar Daerah sebanyak 726 perjalanan dinas luar daerah dimana 527 diantaranya tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perjalanan dinas luar daerah oleh pimpinan dan anggota DPRD Perjalanan dinas oleh 27 pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, dengan perincian yaitu:-----

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADHAN DAMBEA ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp167.080.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, lima perjalanan dinas senilai Rp 64.280.000,00 ditemukan nama ADHAN DAMBEA dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak delapan kali (13-5) senilai Rp102.800.000,00 (Rp167.080.000,00 – Rp64.280.000,00).-----

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FIKRAN AZ SAILAMA ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 40 kali senilai Rp 517.060.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai...

Halaman 29 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp154.320.000,00 ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 30 kali (40-10) senilai Rp362.740.000,00 (Rp517.060.000,00-Rp154.320.000,00) tidak ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan tersebut;-----

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FERİYANTO MAYULU;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp123.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, dua perjalanan dinas senilai Rp19.500.000,00 ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak sepuluh kali (12-2) senilai Rp103.950.000,00 tidak ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan tersebut;-----

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL LATIF YUNUS;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ALY sebanyak 24 kali senilai Rp265.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam keberangkatan atas nama ALY dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 17 kali (24-6) tidak ditemukan nama ALY dalam manifest penerbangan dan satu keberangkatan ke Kotamubagu via perjalanan darat tidak ada bukti keberangkatannya senilai Rp168.440.000,00 (Rp265.340.000,00 – Rp96.900.000,00).-----

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RAMLI DJAFAR;-----

untuk



untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp333.980.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp118.770.000,00 ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan, satu perjalanan dinas ke Manado via perjalanan darat senilai Rp10.600.000,00 dan sisa perjalanan dinas sebanyak 18 kali (29-10) senilai Rp204.610.000,00 (Rp333.980.000,00-Rp. 118.770.000,00 – Rp10.600.000,00) tidak ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan tersebut. -----

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SAHLAN TAPULU;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 16 kali senilai Rp171.400.000,00.. ST tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 16 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp61.600.000,00,- sehingga yang tidak ada bukti sebesar Rp109.800.000,00 (Rp171.400.000,00 – Rp61.600.000,00);-----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RIDWAN PODUNGGE;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada RP sebanyak 19 kali senilai Rp200.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama RP dalam sembilan keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp95.300.000,00 dan satu kali keberangkatan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan via darat ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak sembilan keberangkatan perjalanan dinas (19-10) tidak ditemukan nama RP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp94.550.000,00 (Rp200.450.000,00 - Rp95.300.000,00 - Rp10.600.000,00);-----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIMIN DUGGIO ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp. 316.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas atas nama ADUNG dalam manifest penerbangan, 21 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ADUNG dalam manifest penerbangan tersebut dan satu perjalanan dinas ke Kotamubagu via perjalanan darat sebesar Rp226.650.000,00 (Rp316.000.000,00 - Rp89.350.000,00);-----

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HAMAN T ABAS ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 27 kali senilai Rp294.400.000,00. HTA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 27 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya tujuh kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp76.350.000,00 sebesar Rp218.050.000,00 (Rp294.400.000,00 - Rp76.350.000,00).-----

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJONI DAMA;-----

untuk...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 26 kali senilai Rp282.000.000,00. JD tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 26 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp58.250.000,00 sebesar Rp223.750.000,00 (Rp282.000.000,00 - Rp58.250.000,00);-----

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh KISMAN PULUHULAWA;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp. 318.500.000,00. KP tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 30 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya sembilan kali dan menerima pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp92.950.000,00. Dari sembilan perjalanan tersebut, satu perjalanan dinas ke Mamuju KP tidak berangkat namun menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp8.800.000,00 sebesar Rp 234.350.000,00 (Rp 318.500.000,00 – Rp 92.950.000,00 + Rp 8.800.000,00)

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELMI ADAM;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp69.000.000,00. HA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak tujuh kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak empat kali
senilai...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp31.500.000,00 sebesar Rp37.500.000,00 (Rp 69.000.000,00 – Rp 31.500.000,00)-----

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YANTI SIBA;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 23 kali senilai Rp254.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukannya YS dalam tujuh keberangkatan. Selain itu terdapat satu kali keberangkatan ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak 15 keberangkatan perjalanan dinas tidak ditemukan nama YS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp 166.050.000,00 (Rp 254.250.000,00 – Rp 88.200.000,00);-----

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN MUSTAFA;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp44.550.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak ditemukan nama ZM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp44.550.000,00.-----

15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh USMAN POLAPA;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp46.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26 Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkan pengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadi bukan untuk...



untuk kepentingan dinas yang ditunjukkan dengan adanya undangan partai di Pekanbaru. Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidak ditemukan nama UP dalam manifest penerbangan sebesar Rp46.400.000,00

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FARID USMAN;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp308.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo mengakibatkan tujuh perjalanan dinas senilai Rp. 84.950.000,00 terdapat nama FU dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Kotamobagu via darat senilai Rp7.000.000,00. Sisanya sebanyak 21 perjalanan (29-8) senilai Rp216.950.000,00 tidak tercantum nama FU dalam manifest penerbangan sebesar Rp216.950.000,00 (Rp308.900.000,00 - Rp84.950.000,00 - Rp7.000.000,00)-----

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUPARDI PUJO;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 33 kali senilai Rp348.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, enam perjalanan dinas senilai Rp64.900.000,00 ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 perjalanan dinas luar daerah (33-6) tidak ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp284.000.000,00 (Rp 348.900.000,00 – Rp 64.900.000,00) -----

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh INDRAWANTO HASAN;-----

untuk...



untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp257.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat hanya dua kali keberangkatan atas nama IH senilai Rp23.200.000,00 yang ditemukan dalam manifest penerbangan. Sedangkan 22 perjalanan dinas sisanya (24-2) tidak ditemukan nama IH dalam manifest penerbangan sebesar Rp233.800.000,00 (Rp257.000.000,00 - Rp23.200.000,00);-----

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJAHRA MAUDA;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 31 kali senilai Rp330.550.000,00. Selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp57.100.000,00 ----- yang tercantum nama DM dalam manifest penerbangan. Sisanya sebanyak 26 perjalanan dinas (31-5) tidak ditemukan nama DM dalam manifest penerbangan sebesar Rp273.450.000,00 (Rp330.550.000,00 - Rp57.100.000,00)-----

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ERWIN RAUF;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp316.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas senilai Rp.92.600.000,00 dengan nama ER tercantum dalam manifest...



manifest penerbangan. Sedangkan 21 perjalanan dinas sisanya (29-8), tidak ditemukan nama ER dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp223.800.000,00 (Rp316.400.000,00 – Rp92.600.000,00)-----

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IBHRAHIM MOES HIIPITO;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada IMH sebanyak 19 kali senilai Rp203.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat perjalanan dinas ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya 14 perjalanan dinas (19-5) tidak ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan sebesar Rp150.250.000,00 (Rp203.250.000,00 – Rp53.000.000,00).-----

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IKE DJAFAR KASIM;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 11 kali senilai Rp115.850.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya enam perjalanan dinas (11-5) tidak ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan sebesar Rp62.800.000,00 (Rp115.850.000,00 – Rp53.050.000,00)-----

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NELLY MARJUN;-----

untuk...



untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp321.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama NEM dalam manifest penerbangan, sisanya sebanyak 24 perjalanan dinas (30-6) tidak ditemukan nama NEM dalam manifest penerbangan sebesar Rp262.000.000,00 (Rp321.900.000,00 – Rp59.900.000,00);-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RUSNI DJAFAR;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp. 265.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama RUDJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya 18 perjalanan dinas (24-4) tidak ditemukan nama RUDJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp. 202.800.000,00 (Rp. 265.000.000,00 – Rp. 62.200.000,00) ;-----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASRIYATI NADJAMUDIN;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp73.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan, dan tiga perjalanan dinas tidak ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan tersebut. sebesar Rp33.700.000,00 (Rp73.150.000,00 – Rp39.450.000,00)

26. Pelaksanaan...



26. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh
ZULKARNAIN DUNDA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 20 kali senilai Rp214.270.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tujuh keberangkatan dengan atas nama ZD dalam manifest penerbangan dan 14 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ZD dalam manifest penerbangan sebesar Rp137.570.000,00 (Rp214.270.000,00 – Rp76.700.000,00);-----

27. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NMO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 14 kali senilai Rp179.560.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp67.940.000,00 atas nama NMO dalam manifest penerbangan. Sedangkan sembilan pelaksanaan perjalanan dinas sisanya (14-5) senilai Rp.111.620.000,00 (Rp179.560.000,00 – Rp.67.940.000,00) tidak ditemukan nama NMO dalam manifest penerbangan.-----

2) Perjalanan Dinas oleh Pegawai Sekretariat DPRD
Perjalanan dinas oleh 26 pegawai sekretariat DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008 dengan perincian, yaitu:-----

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh
ABDUL KADIR SABA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua perjalanan dinas senilai Rp10.200.000,00 atas nama AKS dalam manifest penerbangan. Sedangkan tiga perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama AKS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp15.300.000,00 (Rp25.500.000,00 – Rp10.200.000,00);-----

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASDIN PAKAYA;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp89.950.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama ASDP dalam manifest penerbangan. Sedangkan sepuluh perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama ASDP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp74.750.000,00 (Rp89.950.000,00 - Rp15.200.000,00);-----

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DANDI WINARDI DATAU;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp28.500.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama DWD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp28.500.000,00;-----

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ELLEN YUNUS;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp22.000.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ELY dalam manifest penerbangan sebesar Rp22.000.000,00-----

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HENDRIYANTO UMAR ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HU dalam manifest penerbangan sebesar Rp32.600.000,00;-----

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOHAMMAD FAISAL MOODUTO ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp33.100.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan via darat ke Manado dengan nilai total Rp19.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan dinas sisanya tidak tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan sebesar Rp.14.000.000,00 (Rp33.100.000,00 – Rp.19.100.000,00);-----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOH. NUR MAKU ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp33.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan

maskapai

Halaman 41 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tiga perjalanan dinas atas nama MNMN senilai Rp19.200.000,00. Sedangkan sisanya dua keberangkatan tidak ditemukan nama MNMN dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.140.000,00 (Rp33.340.000,00 – Rp19.200.000,00);-----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YUSRIN DAUD;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak sepuluh kali senilai Rp64.800.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama YD dan delapan perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama YD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp51.750.000,00 (Rp64.800.000,00 - Rp13.050.000,00) ;-----

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIEF MURSILA KOLI ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp31.350.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMK dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp31.350.000,00;-----

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUFENTI RAUF;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, tidak terdapat nama SUFR dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp25.500.000,00;-----

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HASNIAH TOMAYAHU ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp26.900.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HT dalam manifest penerbangan sebesar Rp26.900.000,00-----

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDURAHMAN MOINTI ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak delapan kali senilai Rp51.990.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat empat keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp24.800.000,00 tercantum nama AM dalam manifest penerbangan. Atas empat perjalanan dinas sisanya (8-4), tidak terdapat nama AM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp27.190.000,00-----

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh EFENDI LAMATENGO;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp96.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut: -----
Terdapat tiga perjalanan dinas senilai Rp24.450.000,00 yang tercantum nama EFL dalam manifest penerbangan

sebesar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp71.700.000,00 (Rp96.150.000,00 –
Rp24.450.000,00)-----

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELDI
DIANO DUNGGIO ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah
kepada HD sebanyak dua kali senilai Rp10.300.000,00..
Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air
dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak
terdapat nama HD dalam manifest penerbangan
sebesar Rp10.300.000,00.-----

15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh
LINANG MUSA-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah
kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai
Rp11.200.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari
Gorontalo, tidak terdapat nama LM dalam manifest
penerbangan sebesar Rp11.200.000,00;-----

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADAM
DUMBI ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah
kepada ADM sebanyak tiga kali senilai
Rp17.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari
Gorontalo, tidak terdapat nama ADM dalam manifest
penerbangan sebesar Rp17.400.000,00-----

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh TITIN
YUSUF;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah

kepada

Halaman 44 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp12.100.000,- Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas perjalanan dinas ke KPU tidak terdapat nama TY dalam manifest penerbangan sebesar Rp6.500.000,00-----

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh AMNAWATI YAHYA-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMNY dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp11.400.000,00-----

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MEISKE USULI;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama MU dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.600.000,00— -----

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRWAN DAGONG;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan

keberangkatan ...



keberangkatan dari Gorontalo, terdapat dua nama ID dalam manifest penerbangan senilai Rp12.400.000,00. Sisanya sebanyak tiga perjalanan tidak ditemukan nama ID dalam manifest penerbangan sebesar Rp20.200.000,00 (Rp32.600.000,00 - Rp12.400.000,00)-----

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh
21. HERMANTO THALIB;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali senilai Rp15.300.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, atas dua perjalanan dinas ke Jakarta, tidak terdapat nama HTL dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.400.000,00 (Rp15.300.000,00 - Rp3.900.000,00);-----

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRAMAYA ERAKU ;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.800.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama IE dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.800.000,00;-----

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh Z U B A I R;-----
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp44.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari

Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, terdapat tiga keberangkatan senilai Rp18.100.000,00 sedangkan sisanya empat keberangkatan tidak ditemukan nama Z dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp26.000.000,00 (Rp44.100.000,00 – Rp18.000.000,00);-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RISAN ISMAIL;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp42.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas tujuh perjalanan dinas yang dinyatakan dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran, ditemukan tiga perjalanan dinas senilai Rp19.200.000,00 tercantum nama RIS dalam manifest penerbangan, sedangkan empat pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp. 23.050.000,00 (Rp42.250.000,00 – Rp. 19.200.000,00) tidak ditemukan nama RIS dalam manifest penerbangan tersebut;-----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RONAL IDRUS ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp26.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, hanya terdapat dua nama RID dalam manifest penerbangan dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp14.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan sisanya tidak tercantum nama RID dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (Rp26.600.000,00 – Rp14.100.000,00).;-----

3)Perjalanan



3) Perjalanan Dinas oleh Istri Pimpinan DPRD;-----
Empat istri pimpinan DPRD melaksanakan 21 perjalanan dinas luar daerah. Istri pimpinan DPRD dicantumkan dalam lembar SPPD sebagai pengikut dalam SPPD yang bersangkutan senilai sebesar Rp185.050.000,00.-----

- Bahwa dalam membuat SPPD Luar Daerah tersebut, terdakwa dan HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku bendahara pengeluaran hanya melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh terdakwa tanpa melakukan pengecekan kebenaran SPT tersebut.
- Bahwa pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat oleh terdakwa tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tetapi hanya dibuat secara formalitas/rekayasa.-----
- Bahwa dari SPPD Luar daerah yang dibuat oleh terdakwa di catat dalam Buku Kas Umum (BKU) oleh HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku bendahara pengeluaran.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat SPPD tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan :-----

1. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- (1). PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah di sediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.-----
- (2). (a) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.-----
- (3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang nerkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan

surat ...



surat bukti dimaksud.-----

2. Pasal 61 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----
3. Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----
4. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK SKPD mempunyai tugas melakukan verifikasi SPPD. -----
5. Pasal 3 Peraturan Walikota Gorontalo No. 9 tahun 2008 ayat (1) Walikota, Wakil Walikota, pimpinan DPRD dan sekretaris daerah karena kedudukan protokolnyadiharuskan didampingi oleh suami/isteri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/isteri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas PNS eselon IIB tanpa diberikan uang representasi.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Daerah atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.GOR/II/2011 tanggal 14 Oktober 2011, terdapat kerugian negara, yaitu :-----

Jumlah Kas Daerah yang dikeluarkan Rp 7.346.140.000,00
untuk membiayai belanja perjalanan
dinas luar daerah pimpinan dan
anggota DPRD dan pegawai
Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
periode 1 Januari s.d. 31 Oktober
2008
Perjalanan dinas riil yang Rp 2.027.130.000,00
dilaksanakan sesuai hasil penyidikan

dan ...



dan manifest sebagai bukti
pendukung

Kerugian Daerah Rp 5.319.010.000,00

Pengembalian ke Kas Daerah Rp 931.430.000,00

Kerugian Daerah yang harus Rp 4.387.580.000,00

dipulihkan

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama HASNIAH TOMAYAHU, SE sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memperkaya terdakwa dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar **Rp. 5.319.010.000,00** (lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-05/GORON/12/2013, tanggal 16 Juli 2013, telah dituntut sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL MOODOETO, MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primer;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD FAISAL MOODOETO ...

Halaman 50 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOODOETO, MH dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan;-----

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.193.790.000,-(Dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 3 (Tiga) bulan;-----
4. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), subsid 6 (Enam) bulan kurungan;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;-----
6. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo;-----
2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008;-----
3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;-----
4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;-----
5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi stwan DPRD dalam kedudukan DPRD;-----
6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;-----
7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th 2008);-----
8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;-----
9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo TA. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;-----
10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda, orgss, pendapatan

Halaman 51 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota
Gorontalo TA. 2008;-----

11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo Nomor
SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;-----
12. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5 Februari 2008 dari
ADHAN DAMBEA Rp. 10.000.000,-;-----
13. 1 lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29 September 2008
dari BPKD Rp. 15.000.000,-pinjaman FERYANTO MAYULU;-----
14. 1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September 2008
dari BPKD Rp 30.000.000,-yang diterima oleh SUFENTY RAUF;
15. 1 Lembar Kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- pinjaman
sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF;
16. 1 Lbr Kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000,- tgl 19 Sept dr
BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY RAUF.-----
17. 3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;-----
18. 16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal kerja
RAMLI DJAFAR.-----
19. 17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja
an. ADHAN DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;-----
20. 12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des
2008;-----
21. 1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008;
22. 1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008;
23. 21 1 Buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April 2010.-----
24. 1 (satu) buah buku Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap
Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo.-----

“Tetap terlampir dalam berkas perkara”

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 7.500,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut
Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri ...

Halaman 52 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo telah menjatuhkan Putusan Nomor:
02/PID.SUS.Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 26 September 2013 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FAISAL MODOOETO, S.Sos, MH.**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHAMMAD FAISAL MODOOETO, S.Sos, MH.**, tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun ; dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;-----

3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo;-----

2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008; ---

3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;-----

4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;-----

5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi stwan DPRD dalam kedudukan DPRD;-----

6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;-----

7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th 2008);-----

8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;-----

9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;-----

10. Legalisir

Halaman 53 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda, orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008;-----
 11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;-----
 12. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5 Februari 2008 dari ADHAN DAMBEA Rp. 10.000.000,-;-----
 13. 1 lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29 September 2008 dari BPKD Rp. 15.000.000,-pinjaman FERYANTO MAYULU;-----
 14. 1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September 2008 dari BPKD Rp 30.000.000,-yang diterima oleh SUFENTY RAUF;-----
 15. 1 Lembar Kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- pinjaman sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF;-----
 16. 1 Lbr Kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000,- tgl 19 Sept dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY RAUF.
 17. 3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;-----
 18. 16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal kerja RAMLI DJAFAR.-----
 19. 17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja an. ADHAN DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;-----
 20. 12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des 2008;-----
 21. 1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008;-----
 22. 1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008;-----
 23. 21 1 Buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April 2010.
 24. 1 (satu) buah buku Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo.-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

5.Membebankan ...

Halaman 54 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing di hadapan Plt Panitera dan Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing yaitu pada tanggal 26 September 2013 dan tanggal 02 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding Nomor: 24/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo dan Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 07 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 18 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding bertanggal 4 November 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2013; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 13 November 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2013 sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 November 2013, dan kontra memori

banding

Halaman 55 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2013 sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sesuai dengan surat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo bertanggal 06 November 2013, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permohonan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya yang tidak membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti akibat kerugian negara yang ditimbulkan dan penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi ketentuan ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Oleh karenanya Jaksa Penuntut umum minta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan selain mengulang yang telah dikemukakan tentang keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum...

Halaman 56 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagaimana yang telah diputus pada putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, juga mengemukakan alasan bahwa unsur-unsur dari pasal-pasal undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu agar kepada Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya dan agar Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*); -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya masing-masing hanya merupakan pengulangan sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam memori bandingnya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang keduanya masing-masing diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal baru karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan memperbaiki kualifikasi tindak pidana, penjatuhan pidana tambahan tentang Uang Pengganti, serta mengenai status barang bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut telah benar, akan tetapi pencantuman/penulisan pada amar putusan tidak konsisten

dengan...

Halaman 57 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangannya tersebut, sehingga kualifikasi tindak pidana tersebut harus diperbaiki; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan hukumnya bahwa kerugian negara atau daerah telah dibebankan kepada Hasniah Tomayahu selaku bendahara pengeluaran yang telah memperoleh uang tersebut dan membuat pertanggungjawaban berdasarkan bukti perjalanan dinas luar daerah yang tidak sah yang menurut perhitungan BPK-RI mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 4.387.580.000,- (Empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh harta benda baik berupa uang atau barang yang berasal dari tindak pidana korupsi atas realisasi penggunaan anggaran dari DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara atau daerah yang seharusnya dibebankan kepada Hasniah Tomayahu selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:-----
Bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah melihat lebih dari satu kali Hasniah Tomayahu (Terdakwa dalam perkara lain) mengantar uang ke Ketua Dewan namun tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan dan tidak pernah menanyakan kepada Hasniah Tomayahu bagaimana cara pertanggung-jawabannya

Halaman 58 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung-jawabannya terhadap uang yang diserahkan kepada Ketua Dewan tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Dewan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena tidak memeriksa secara seksama laporan pertanggung-jawaban bendahara beserta lampirannya; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dengan cara fiktif tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kepada Terdakwa patut dan terdapat alasan hukum untuk dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara/daerah yang sangat besar jumlahnya yang diakibatkan dari penandatanganan dan/atau pengesahan dokumen oleh Terdakwa mengenai perjalanan dinas luar daerah yang tidak sah menurut hukum secara berlanjut tersebut, yang besarnya sebagaimana yang diajukan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa terhadap penentuan status barang bukti dalam perkara ini yang menurut Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat pertama dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi meneliti berkas perkara Terdakwa pada lembar Daftar Barang Bukti, ternyata hanya tertera tulisan yang menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini telah digunakan dalam berkas perkara atas ketersangkaan Hasniah Tomayahu, SE (splittings), dan ternyata benar bahwa pada berkas perkara Nomor: 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo Jo. Nomor: 14/Pid.Sus/2013/PT.Gtlo atas nama

Halaman 59 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Hasniah Tomayahu, SE terdapat foto copy barang bukti dimaksud, yang telah dijilid menjadi satu dengan berkas tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam perkara ini perlu memperbaiki mengenai status barang bukti tersebut karena telah digunakan dalam perkara Hasniah Tomayahu, SE; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 02/PID.SUS.Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 26 September 2013 perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana pada amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 02/PID.SUS.Tipikor/2013/PN.Gtlo

Halaman 60 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Gtlo tanggal 26 September 2013 tentang kualifikasi tindak pidana, penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dan mengenai status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Faisal Moodoeto, S.Sos, MH. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Faisal Moodoeto, S.Sos, MH. tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000; (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.193.790.000,- (Dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini telah dipergunakan dalam perkara Nomor: 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo Jo. Perkara nomor: 14/Pid.Sus/2013/PT.Gtlo atas nama Terdakwa Hasniah Tomayahu, SE; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Gorontalo ...

Halaman 61 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Desember 2013**, oleh kami:
KUSNOTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.** dan **ANSORI, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **POEDJI RAHARDJO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.

TTD

ANSORI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

KUSNOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

POEDJI RAHARDJO, S.H.

TURUNAN RESMI PENGADILAN TINGGI GORONTALO PANITERA,

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003